

## **LOKAKARYA ASIA:**

### **IYAF 2022-Merayakan Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dan Berkeadilan**

#### **Sesi 1: Akses komunitas nelayan skala kecil ke sumber daya**

Dalam konteks perikanan, kata 'akses' dapat merujuk pada hak atau kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari atau menggunakan sumber daya hayati, atau untuk mendapatkan keuntungan dari atau menggunakan wilayah yang terkait dengan kehidupan dan mata pencaharian komunitas nelayan.

'Akses terbuka' dimungkinkan ketika kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari atau menggunakan sumber daya perikanan laut atau pedalaman tidak didasarkan pada kerangka hukum atau kelembagaan, termasuk tertulis dari lembaga tradisional atau adat.

Akses, di sisi lain, dapat menjadi 'hak tenurial' jika didasarkan pada kerangka kelembagaan (hukum tradisional, adat atau formal) yang memberikan dan melindungi hak untuk memanfaatkan atau menggunakan sumber daya lahan dan perikanan—paling sering pada individu atau tingkat kolektif.

Konsisten dengan Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan dan Hutan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (VGGT), sistem tenurial dimaksudkan untuk mendefinisikan dan mengatur hak tenurial, terutama bagaimana nelayan laki-laki dan perempuan dan pekerja perikanan di sepanjang rantai memperoleh hak atas tanah, air atau sumber daya air hidup, dan menentukan siapa yang dapat menggunakan sumber daya ini, untuk berapa lama dan dalam keadaan apa. Selain memastikan hak dan tanggung jawab terkait tenurial, VGGT berupaya memastikan tata kelola tenurial yang bertanggung jawab, karena perikanan bersama dengan tanah dan hutan, dianggap penting bagi realisasi hak asasi manusia, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penghidupan berkelanjutan, stabilitas sosial, keamanan perumahan, dan pembangunan pedesaan (paragraf 4.1).

Aspek-aspek hak tenurial dalam konteks penangkapan ikan dapat mencakup: hak individu atau komunitas untuk menggunakan kapal yang diizinkan (baik yang dimekanisasi atau tidak) dan peralatan (misalnya, stasioner, jaring lingkar, diderek atau tidak diderek) di perairan atau area yang ditentukan untuk mendapatkan sumber daya tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini mungkin didasarkan pada kebiasaan tidak tertulis atau kode etik masyarakat setempat; aturan koperasi atau asosiasi; aturan Negara; atau lisensi/izin. Sementara itu, beberapa elemen hak tenurial berkembang dengan baik dalam konteks geografis tertentu, maupun yang lain yang kurang berkembang dan perlu menjadi hak yang efektif untuk menjadi bagian dari keseluruhan yang koheren.

Dalam konteks ini, dapat dicatat bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 14b adalah untuk “menyediakan akses bagi nelayan tradisional maupun skala kecil ke sumber daya laut dan pasar”—sebagian menggemarkan pentingnya hak tenurial dalam konteks kelautan.

Hak penguasaan atas tanah dapat mencakup hak untuk memiliki tanah untuk sementara atau tetap, sekurang-kurangnya untuk perumahan dan fasilitas lainnya, untuk melakukan

penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, dan untuk kesejahteraan komunitas nelayan.

Merujuk pada Panduan Sukarela untuk Mengamankan Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (Pedoman SSF), hak tenurial dapat mencakup Negara yang memberikan akses preferensial perikanan skala kecil untuk menangkap ikan di perairan di dalam yurisdiksi nasional melalui langkah-langkah seperti sebagai pembentukan dan pemberlakuan zona eksklusif perikanan skala kecil, terutama yang menguntungkan kelompok rentan.

Meskipun hak tenurial atas tanah dan badan air yang berdekatan sangat menarik bagi pemilik atau pengusaha pantai dan riparian, pengaturan tenurial saat ini yang berhubungan dengan sumber daya perikanan laut dan darat, serta wilayah pesisir dan riparian, sangat tidak memadai untuk memenuhi ancaman eksternal, dan belum sepenuhnya dikembangkan untuk berfungsi sebagai “sistem” untuk melindungi dan mempertahankan hak tenurial komunitas nelayan skala kecil di sebagian besar tempat. Ini merupakan tantangan yang masih harus dihadapi.

### **Pertanyaan untuk Diskusi Kelompok**

1. Apakah Anda menikmati hak tenurial, secara individu dan kolektif, atas perumahan dan sumber daya lahan lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan Anda di sepanjang rantai nilai perikanan? Bagaimana hak-hak ini dapat dibuat lebih adil dan terjamin bagi laki-laki dan perempuan?
2. Apakah Anda menikmati hak tenurial atas sumber daya perikanan, pesisir dan sempadan sungai untuk nelayan dan pengolah ikan laki-laki dan perempuan? Apakah itu hak formal atau hak tradisional atau adat? Apakah hak tenurial, misalnya, mengakui peran komunitas nelayan skala kecil untuk memulihkan, melestarikan, melindungi, dan mengelola bersama ekosistem perairan dan pesisir setempat?
3. Ancaman apa yang dihadapi komunitas nelayan terkait dengan akses mereka ke daratan atau badan air? Bagaimana hak tenurial mampu bertahan dan mengatasi ancaman ini?
4. Apakah ada kasus penggusuran sewenang-wenang dan pemutusan hak tenurial komunitas nelayan skala kecil atas tanah dan badan air?
5. Apakah ada inisiatif untuk memulihkan akses ke daerah penangkapan ikan tradisional dan lahan pesisir untuk komunitas nelayan skala kecil yang terlantar akibat bencana alam atau konflik?
6. Apakah ada konsultasi yang berarti dengan komunitas nelayan skala kecil sebelum pelaksanaan proyek pembangunan skala besar? Apakah studi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan melaporkan hasil konsultasi tersebut?
7. Apakah ada mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hak tenurial dan untuk memastikan ketersediaan pemulihan seperti restitusi atau ganti rugi, kompensasi yang adil dan reparasi?